



**Judul** : Data Penduduk Aman Kan ?  
**Tanggal** : Minggu, 14 Mei 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 6

## Kemendagri Bakal Terapkan KTP Digital

# Data Penduduk Aman Kan?

**Senayan menyoroiti kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerapkan identitas kependudukan digital. Langkah ini perlu dibarengi dengan jaminan keamanan data kependudukan.**

ANGGOTA Komisi II DPR Guspari Gaus mengatakan, upaya Kemendagri mengajak masyarakat melakukan aktivasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital atau Identitas Kartu Digital (IKD) patut diapresiasi. Namun, penerapan KTP Digital ini harus dibarengi dengan perbaikan kualitas IKD.

"Perbaikan kualitas IKD ini tentu bertujuan untuk penyempurnaan dan inovasi fungsi terhadap IKD agar menjadi identitas serba guna," kata Guspari, kemarin.

Guspari bilang, Komisi II DPR sudah melakukan studi banding ke sejumlah negara guna mendukung perbaikan IKD. Salah satunya adalah ke negara Turki. Di sana dia menemukan penggunaan identitas kartu penduduk sudah multifungsi.

"Bisa digunakan untuk memperbaiki semua persoalan, mulai

dari KTP, Surat Izin Mengemudi (SIM), kartu perbankan, dan lain sebagainya," katanya.

Makanya, dia mendorong dalam penerapan KTP Digital ini hendaknya betul-betul memperhatikan aspek keamanan data digital yang disimpan di aplikasi IKD. Kemendagri harus bisa memberikan jaminan terhadap keamanan data agar tidak mudah diretas.

"Ancaman serangan digital sejak awal harus bisa dimitigasi supaya tidak merugikan masyarakat yang data-datanya disimpan dalam IKD," ujar politisi Fraksi PAN ini.

Dia menilai, kebijakan IKD ini sangat baik untuk mencegah terjadi penyalahgunaan identitas masyarakat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak masyarakat melaporkan identitasnya digunakan oleh orang lain padahal mereka tidak

pernah mendaftarkan diri. "Itu dari mana? Harusnya negara bertanggung jawab atas kelemahan sistem-sistem itu," jelas dia.

Apalagi, saat ini data kependudukan juga digunakan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. "Intinya, persoalan harus dibedah dan dimitigasi berbagai risiko dan aspek keamanan. Data masyarakat adalah sesuatu yang mutlak untuk diproteksi dengan tingkat keamanan berlapis," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Kemendagri menargetkan pada tahun 2023 ini sebanyak 25 persen penduduk atau 50 juta warga melakukan aktivasi IKD melalui aplikasi yang terhubung di ponsel pemilikinya. Aplikasi ini bertujuan untuk meminimalkan penggunaan berkas fisik dalam mengurus layanan publik.

Rencananya, aplikasi ini terintegrasi dengan sistem layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, layanan bantuan sosial dari pemerintah. Termasuk, layanan Kartu Indonesia Pintar hingga keperluan *check in* di bandara dan stasiun kereta api.

Sementara anggota Komisi X Lestari Moerdijat mengingatkan pentingnya mewujudkan satu data kependudukan sebagai acuan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Pemanfaatan satu data kependudukan ini juga bagian dari upaya untuk memastikan agar proses pembangunan di berbagai bidang benar-benar tepat sasaran.

Lestari menuturkan, saat ini memang masih terjadi perbedaan data penduduk miskin di antar lingkup Kementerian/Lembaga. Seperti, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dipakai Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Data mereka kerap mencatat jumlah orang miskin di satu daerah dengan jumlah yang berbeda. Demikian juga dengan perbedaan data penyandang disabilitas yang dimiliki pemerintah dan data dari sejumlah yayasan serta lembaga tempat

para penyandang disabilitas berhimpun.

Sementara laporan Badan Pusat Statistik (BPS) justru mengungkap jumlah penduduk miskin per September 2022 sebesar 26,36 juta orang. Sedangkan, pada tahun yang sama penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang.

"Kondisi beragamnya data ini harus diakhiri dan segera diwujudkan satu data kependudukan yang akurat, melalui berbagai upaya pemutakhiran data," ujarnya.

Karena itu, Wakil Ketua MPR ini mendorong adanya satu data kependudukan yang akurat sebagai bagian dari faktor pendorong dalam percepatan pembangunan di sejumlah bidang. Terutama dalam hal pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

"Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya jumlah penduduk, upaya pemutakhiran data kependudukan harus konsisten dilakukan secara periodik," jelas politisi Fraksi Nasdem ini. ■ KAL